

## **BAB II**

### **OPERASIONAL**

### **KEPELABUHANAN**

---

Pada bab ini membahas tentang diskripsi kepelabuhanan secara makro dan mikro, yang bertujuan untuk mengetahui peraturan tentang kepelabuhanan (PP. No. 70 tahun 1996) dan pertimbangan pengembangan pelabuhan (RJPP 1998-2003). Untuk itu dibagi dalam beberapa sub judul, yaitu sebagai berikut: (1). Sejarah singkat kepelabuhanan (2). Tata kepelabuhanan nasional (3). Sejarah singkat pelabuhan Tanjung Pinang (4). Pelabuhan sebagai pintu gerbang pertumbuhan perekonomian (5). Fasilitas pelabuhan (6). Instansi yang berada di pelabuhan (7). RJPP 1998-2003.

#### **2.1. Sejarah Singkat Kepelabuhanan**

PT. (persero) Pelabuhan Indonesia I berkantor pusat di jalan Krakatau Ujung No. 100 Medan dan mempunyai 15 cabang Pelabuhan yang tersebar di wilayah kerja pada 3 kantor wilayah perhubungan di Propinsi Aceh, Propinsi Sumatra dan Propinsi Riau. Adapun 15 cabang pelabuhan umum di bawah PT. (persero) Pelabuhan Indonesia I yang dikelompokkan menjadi 3 strategis bisnis unit adalah:

1. kelompok pelabuhan andalan.
2. kelompok pelabuhan marginal.
3. kelompok pelabuhan belum berkembang.

Pelabuhan Tanjung Pinang termasuk kelompok pelabuhan andalan yaitu cabang kelas I yang mempunyai 3 perwakilan pelabuhan yaitu perwakilan pelabuhan pulau sambu, perwakilan pulau Tanjung Uban dan perwakilan pelabuhan Pulau Batam.

#### **2.2. Tata Kepelabuhanan Nasional**

Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan kepelabuhanan jasa kepelabuhanan. Pelaksanaan kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomian lainnya ditata secara terpadu guna mampu mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan, dalam arti kata ditata dalam satu kesatuan tataan kepelabuhanan nasional guna mewujudkan penyelenggaraan pelabuhan yang berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Penyusunan tata kepelabuhanan nasional dilakukan dengan memperhatikan tata ruangan wilayah (memuat fungsi, penggunaan, klasifikasi, jenis, penyelenggaraan dan kegiatan pelabuhan), pertumbuhan ekonomi (memuat keterpaduan intra dan antar moda transportasi), kelestarian lingkungan (keterpaduan dengan pembangunan lainnya) dan keselamatan perairan (tentang faktor keamanan dan keselamatan transportasi perairan dan penumpang).

Pada PP. No. 70 tahun 1996 tentang ketentuan umum kepelabuhanan disebutkan bahwa daerah lingkungan kerja pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan adalah wilayah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja pelabuhan umum yang digunakan untuk menjamin keselamatan perairan. Namun pada pelabuhan Tanjung Pinang daerah lingkungan kerja pelabuhan bukan saja untuk kepentingan pelabuhan namun juga untuk kepentingan masyarakat (dibahas pada BAB selanjutnya), hal inilah yang mendasari dari tujuan penulisan tugas akhir, hal ini diperkuat oleh PP No. 70 Tahun 1996 tentang fasilitas penunjang pelabuhan yang di dalamnya terdapat fasilitas pariwisata dan sarana umum.

### **2.3. Sejarah Singkat Pelabuhan Sri Bintang Pura Tanjung Pinang**

Pada awal perkembangannya, pelabuhan yang dikenal sebagai pelabuhan Tanjung Pinang adalah pelabuhan Sri Bintang Pura yang ada saat ini, dengan sarana dan fasilitasnya dibangun pada tahun 1925 dengan konstruksi kayu pada masa jajahan belanda. Peresmian nama Sri Bintang Pura dilakukan pada tanggal 21 Januari 1984 oleh Direktur Jendral Perhubungan Laut, Bapak Pongky Soeparjo bertepatan dengan peresmian terminal penumpang. Nama Sri Bintang Pura bermakna "Pintu gerbang Kepulauan Riau yang permai dan terletak di pulau Bintang yang gemerlapan". Peranan dan fungsinya yang dominan saat ini adalah pelayanan penumpang dalam dan luar negeri.

Program pengembangannya ditujukan untuk peningkatan pelayanan penumpang dan fasilitas terminal penumpang serta lapangan parkir. Kondisi pelabuhan Sri Bintang Pura ini merupakan perkotaan yang sukar untuk dikembangkan ke arah darat. Namun beberapa alternatif diperkirakan dapat diperluas ke arah laut, diperkirakan di samping kiri dan kanan dari lokasi tersebut sudah direklamasi oleh para Investor, maka pelabuhan Sri Bintang Pura harus dapat menyesuaikan kondisi perkembangan tersebut.

---

#### **2.4. Pelabuhan Sebagai Pintu Gerbang Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat Tanjung Pinang dan Para Investor**

---

Sejak awal pertumbuhannya, Tanjung Pinang memang berkembang terutama sebagai kota perdagangan. Kedudukannya yang strategis di posisi silang pelayaran dan perdagangan dunia di Selat Malaya dan Laut Cina Selatan serta imbas dari peranan Singapura sebagai salah satu pusat perdagangan dunia, telah menjadi daya dorong pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa industri di kota Tanjung Pinang. Sejak tahun 1986, industri pariwisata memperoleh perhatian lebih besar berikutan dengan kebijaksanaan Nasional dalam pengembangan industri pariwisata. Tanjung Pinang berkembang menjadi salah satu tujuan wisata di Riau selain Batam, terutama kelompok turis dari Singapura, Malaysia, Eropa Barat dan Jepang. Arus turis semakin tinggi, setelah pemerintah menetapkan kebijaksanaan menunjuk pelabuhan Tanjung Pinang Sri Bintan Pura sebagai pelabuhan yang boleh melaksanakan pemberian Visa On arrival (VOA) untuk turis yang datang berkelompok. Kebijakan tersebut mulai 1 April 1989 ditingkatkan dengan pelabuhan bebas Visa, sehingga Tanjung Pinang merupakan salah satu pintu masuk (Gate Way) untuk daerah tujuan wisata di Riau. Kerjasama bidang ekonomi di kawasan ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura "Growth Triangle (IMS-GT) dan SIJORI (Singapura, Johor dan Riau) adalah wujud kerjasama guna mengantisipasi perkembangan ekonomi yang mengarah kepada Liberalisasi perdagangan dunia.

Pelabuhan laut yang berfungsi sebagai pintu gerbang mempunyai peranan yang tidak kecil terhadap terciptanya kelancaran operasional di pelabuhan, sehingga keberadaannya perlu dipersiapkan dalam mendukung pertumbuhan pembangunan ekonomi baik untuk Daerah, Nasional maupun Internasional.

#### **2.5. Fasilitas Pelabuhan**

Fasilitas Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang pada saat ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Fasilitas pelayanan kapal, (alur, dermaga beton, ponton besi dalam dan luar negeri).
2. Fasilitas Pelayanan penumpang, (terminal luar dan dalam negeri). Berdasarkan pengamatan Pada terminal penumpang dalam maupun luar negeri, terlihat terbalik dalam hal besaran kapasitas. Karena berdasarkan kenyataannya penumpang dalam negeri lebih banyak arus naik dan turunnya (sumber: data dan informasi)

pelabuhan), Sehingga penumpang maupun pengantar banyak yang berada di luar terminal.

3. Fasilitas lainnya, (jembatan penghubung luar dan dalam negeri, lapangan parkir dan perkantoran/instansi pemerintah maupun swasta).

Untuk rincian ukuran masing-masing dapat dilihat pada lampiran di bawah ini:

FASILITAS DI SRI BINTAN PURA			
Letak		00° - 55' - 55" LU	104° - 26' - 06" BT
<b>1. Fasilitas Pelayanan Kapal</b>			
	<i>Panjang (Meter)</i>	<i>Lebar (Meter)</i>	<i>Kedalaman (M.LWS)</i>
- Alur	3,90	50,00	3,5 - 4
	<i>Panjang (Meter)</i>	<i>Lebar (Meter)</i>	<i>Luas (Meter<sup>2</sup>)</i>
- Dermaga Beton 1	60,00	7,60	456,00
- Dermaga Beton 2	30,50	10,50	320,25
- Dermaga Beton 3	30,70	6,90	211,83
- Ponton Besi Luar Negeri	20,00	10,00	200,00
- Ponton Besi Dalam Negeri	15,00	5,00	75,00
- Ponton Ferrocement Dalam Negeri	15,00	6,00	90,00
<b>2. Fasilitas Pelayanan Penumpang</b>			
	<i>Panjang (Meter)</i>	<i>Lebar (Meter)</i>	<i>Luas (Meter<sup>2</sup>)</i>
- Terminal Luar Negeri (Kelas A)			300 Orang
- Lantai Bawah	18,00	27,00	486,00
- Lantai Atas	21,00	30,00	630,00
- Terminal Dalam Negeri (Kelas B)	27,00	17,50	472,50
<b>3. Fasilitas Lainnya</b>			
	<i>Panjang (Meter)</i>	<i>Lebar (Meter)</i>	<i>Luas (Meter<sup>2</sup>)</i>
- Jembatan Penghubung Luar Negeri	213,00	4,40	937,20
- Jembatan Penghubung Dalam Negeri	219,00	4,40	963,60
- Lapangan Parkir	Luas 2.216,00 Meter <sup>2</sup>		

Sumber Data : Divisi Teknik Cabang Pelabuhan Tanjungpinang

TABEL 2.1 FASILITAS PELABUHAN SRI BINTAN PURA

## 2.6. Instansi yang Berada di Pelabuhan

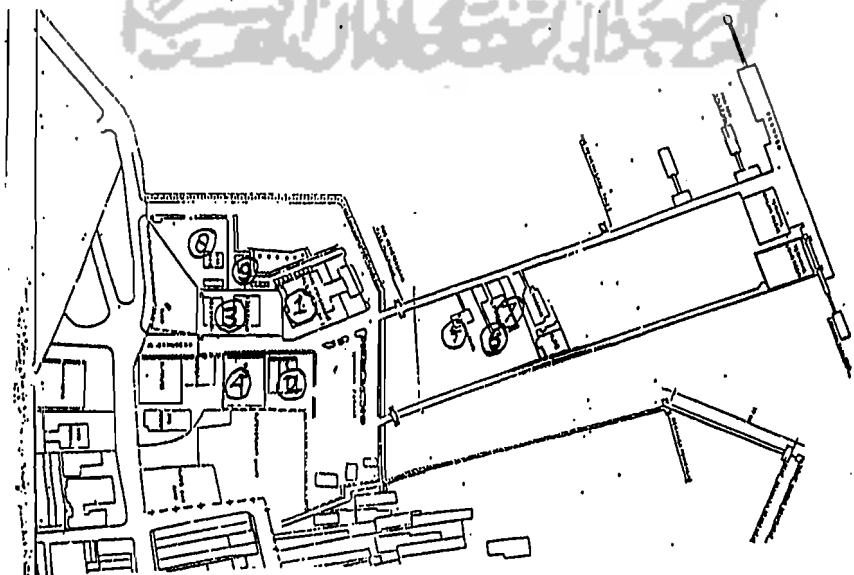
Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) pelabuhan Tanjung Pinang dengan hak pengelola diserahkan kepada PT. Persero Pelabuhan Indonesia I sesuai dengan kep. Menhub. No. KM 54 Tahun 1997 Tanggal 11 Desember 1997, adalah sebagai berikut:

1. DLKR Daratan Dermaga Sri Bintang Pura seluas 11.690 M<sup>2</sup>.
2. DLKR Perairan Pelabuhan Tanjung Pinang seluas 53.916 Ha.
3. DLKP Pelabuhan Tanjung Pinang adalah seluas 2.352 Ha..

Sedangkan Instansi-instansi yang berada pada DLKR pelabuhan adalah sebagai berikut:

1. Pengelola pelabuhan, PT. (persero) Pelabuhan Indonesia I cabang Tanjung Pinang seluas 1792 m<sup>2</sup>
2. Administrator pelabuhan seluas 860 m<sup>2</sup>
3. Kantor pelayanan bea dan cukai seluas 944 m<sup>2</sup>
4. Kantor distrik navigasi seluas 312 m<sup>2</sup>
5. Kantor kesehatan pelabuhan seluas 72 m<sup>2</sup>
6. Kantor karantina tumbuh-tumbuhan seluas 250 m<sup>2</sup>
7. Kantor Karantina ikan seluas 252 m<sup>2</sup>
8. Kantor kesatuan pengamanan polisi pelabuhan (KP3) seluas 168 m<sup>2</sup>
9. Kantor Agen Penjualan Tiket (swasta) seluas 168 m<sup>2</sup>

Untuk mengetahui letaknya dapat dilihat pada lay out pelabuhan di bawah ini:



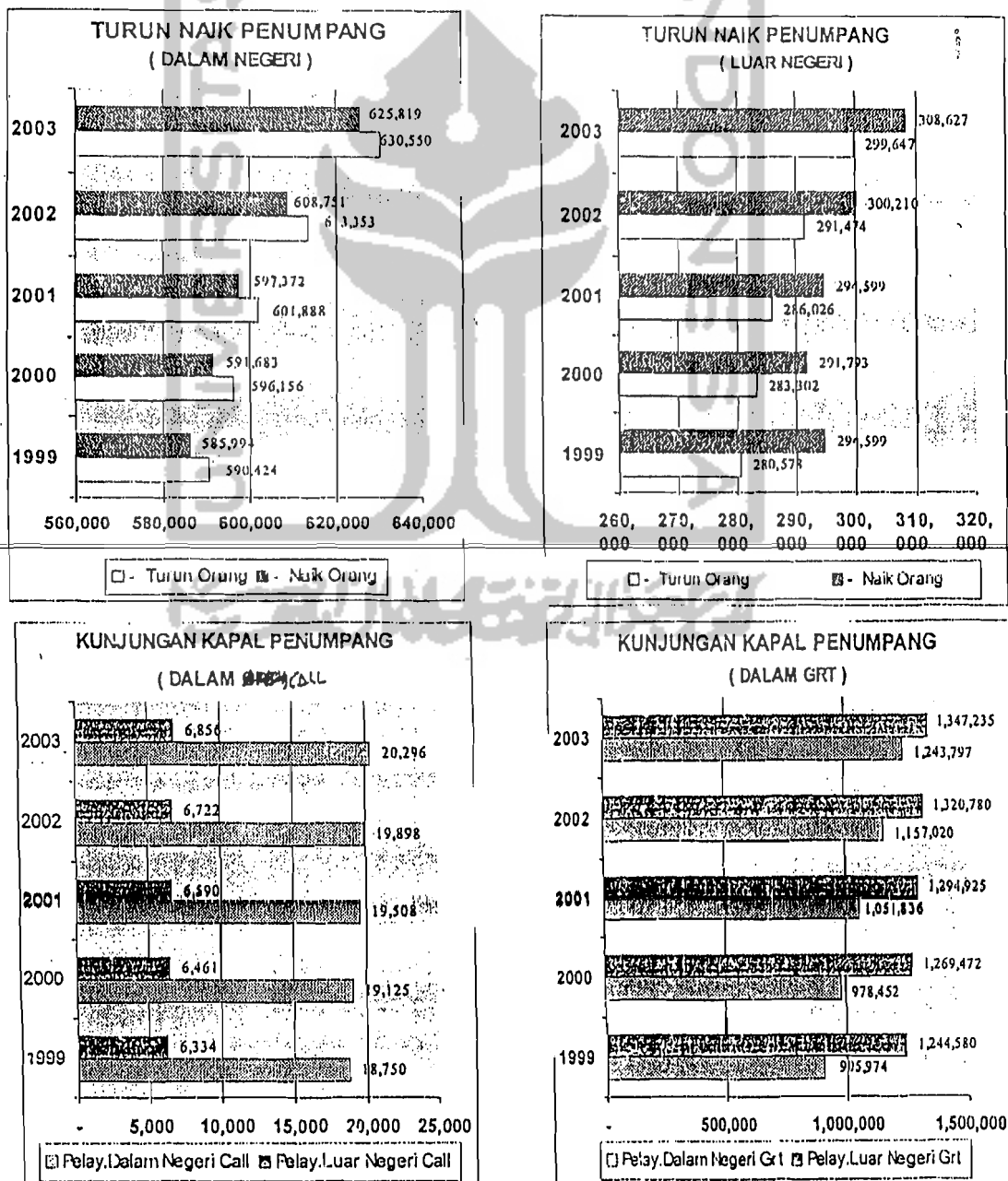
SAMBAR 2.1. INSTANSI YANG BERADA DI PELABUHAN SUMBER, DESA TEKNIK PELABUHAN

## 2.7. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) pelabuhan

Dari data-data yang didapatkan pada buku Data dan Informasi pelabuhan Tanjung Pinang (tahun 1998-2003), yaitu berupa realisasi peningkatan penumpang:

1. Untuk penumpang luar negeri; penumpang turun: mengalami peningkatan rata-rata 20% pertahun dan penumpang naik: mengalami peningkatan rata-rata 11% pertahun.
2. Untuk penumpang dalam negeri; penumpang turun: mengalami peningkatan rata-rata 25% pertahun dan penumpang naik: mengalami peningkatan rata-rata 22% pertahun.

Untuk melihat data statistik turun dan naik penumpang, dapat dilihat pada lampiran dibawah ini:



SAMBAR. 2.2. DATA STATISTIK TURUN NAIK PENUMPANG

Dalam menilai perlu atau tidaknya pengembangan pelabuhan dalam hal peningkatan pelayanan kapal dan penumpang, kita dapat melihat tabel seperti di bawah ini:

TABEL. 2.2. PELAYANAN KAPAL

Pelabuhan Sri Bintang Pura	Aman	Tertib	Cepat	Memuaskan
1. Luar Negeri	Belum	Belum	Cukup	Belum
2. Dalam Negeri	Belum	Belum	Cukup	Belum

Tabel: Pelayanan Kapal

Sumber: RJPP 1999-2003

TABEL. 2.3 PELAYANAN PENUMPANG

Pelabuhan Sri Bintang Pura	Aman	Tertib	Cepat	Memuaskan
1. Luar Negeri	Cukup	Belum	Sedang	Belum
2. Dalam Negeri	Cukup	Tidak	Sedang	Belum

Tabel: Pelayanan Penumpang

Sumber: RJPP 1999-2003

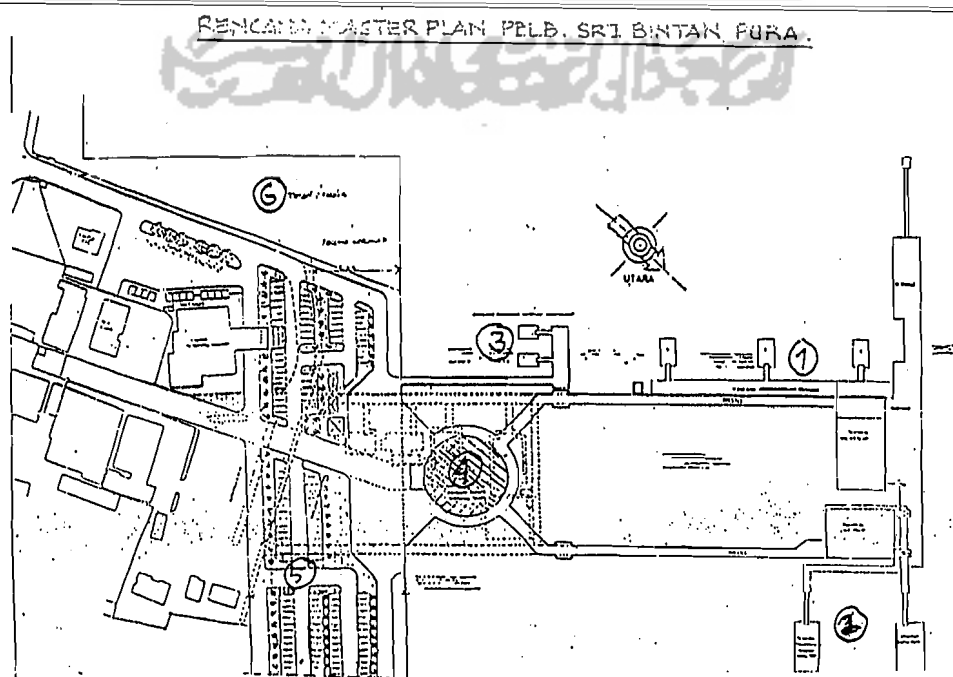
Berdasarkan kondisi eksisting dan analisis perkembangan pada kurun waktu 5 tahun mendatang terkait dengan perkembangan pada perdagangan di kawasan Asean dan ekonomi global, maka PT. (persero) pelabuhan Indonesia I cabang Tanjung Pinang sebagai salah satu sub sistem yang terintegrasi di dalam sistem pelayanan jasa kepelabuhanan mempunyai andil dalam memacu perkembangan kegiatan ekonomi/perdagangan tersebut. Untuk memberikan peran aktif dalam mengantisipasi perkembangan 5 tahun ke depan, cabang pelabuhan Tanjung Pinang menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Perlunya diperhatikan keterlibatan dengan mengkondisikan adanya pemisahan yang jelas untuk terminal kedatangan dan keberangkatan luar negeri maupun dalam negeri. Sebelumnya antara ruang keberangkatan dan kedatangan masih menjadi satu sehingga terjadi kepadatan yang dapat membahayakan keselamatan seseorang.
2. Perlu tambahan petugas pangkalan atau terminal untuk memantau atau memeriksa calon penumpang, pengantar, penjemput dan pengunjung benar-benar telah memiliki pas pelabuhan sesuai ketentuan.
3. Perlunya halaman parkir kedatangan dan keberangkatan, karena sarana parkir yang tersedia kurang mencukupi, kapasitas yang diharapkan adalah sebesar 1,5 kali yang ada. Untuk sementara sarana parkir yang digunakan yaitu jalan sirkulasi umum.

Dengan berdasarkan data-data tersebut/yang telah diterangkan diatas, pihak pelabuhan telah merencanakan pengembangan pelabuhan. Adapun pengembangannya meliputi:

1. Penambahan dermaga dan ponton untuk lintas aniar pulau. Untuk dermaga luasnya menjadi 992 m<sup>2</sup> Sedangkan untuk ponton ditambah satu, dengan luas sebesar 112 m<sup>2</sup>
2. Penambahan dermaga dan ponton untuk tujuan luar negeri. Untuk dermaga luas menjadi 320 m<sup>2</sup> dan ponton ditambah satu dengan luas menjadi 312 m<sup>2</sup>
3. Penambahan dermaga dan ponton (dua buah) serta jembatan penghubung untuk tujuan pulau Penyengat, luas dermaga adalah 256 m<sup>2</sup> untuk ponton seluas 60 m<sup>2</sup> sedangkan luasan jembatan penghubung adalah 224 m<sup>2</sup>
4. Pengelompokan area perkantoran yang berada diantara jembatan penghubung dalam dan luar negeri menjadi pola melingkar dengan dua lantai, sehingga sirkulasi jembatan penghubung mengikuti pola kantor tersebut. Volume dari kelompok perkantoran tersebut adalah 400 m<sup>3</sup>
5. penambahan area parkir kearah laut sebesar 46 m Sehingga luas dari area parkir tersebut menjadi 9420 m<sup>2</sup>
6. penambahan area taman yang berada pada sisi sebelah barat dari pelabuhan, dengan luas sebesar 5256 m<sup>2</sup>

Untuk lebih jelasnya lagi tentang bagian-bagian apa saja yang akan dikembangkan oleh pihak pelabuhan, berikut ini adalah gambar rencana master plan Pelabuhan Sri Bintang Pura Tanjung Pinang:



GAMBAR 2.3 RENCANA MASTER PLAN PELABUHAN  
SUMBER: DEVISI TEKNIK PELABUHAN



Dengan pertimbangan waktu tugas akhir yang singkat, maka untuk penulisan ini penulis akan membahas tentang bagaimana penataan ruang luar area pelabuhan dengan memasukkan aktivitas masyarakat dengan mempertimbangkan batasan-batasan area yang boleh untuk aktivitas masyarakat. Sehingga privasi dari pihak pelabuhan dapat terjaga, yaitu penulis membatasi bahwa aktivitas keseharian masyarakat hanya berada didarat. Hal ini dengan alasan agar aktivitas keseharian masyarakat tidak membuat area jembatan penghubung dan terminal penumpang untuk turun naik penumpang menjadi sangat ramai sehingga faktor kenyamanan untuk penumpang menjadi terganggu. Untuk ukuran yang menyangkut masa/instansi pemerintah dan swasta, penulis mengikuti pihak pelabuhan sedangkan penambahan yang akan dilakukan oleh penulis menyangkut tema dari tugas akhir ini akan dijelaskan pada bab berikutnya.

